
Hard Power Dan Soft Power Penyelesaian Konflik Aceh (Tahun 1976 - 2005)

¹Novita Sari, ²Nurul Fajri, ³Nurul Kamaly, ⁴Reza Fahlevi

email: novitasari028@usk.ac.id

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala

Abstract

The Free Aceh Movement (GAM), declared by Hasan Tiro in 1976, was a form of disappointment caused by the central government's centralism. Not only that, Aceh also supported Indonesia's struggle against the Dutch to maintain independence. Aceh also contributed a considerable amount, even referred to as the capital region of the Republic of Indonesia by Soekarno. The purpose of this research is to find out the state of Aceh before the rebellion of the Free Aceh Movement, the factors that caused the rebellion of the Free Aceh Movement, the rebellion process of the Free Aceh Movement in 1976-2005, and the efforts of the Indonesian government in realising peace in Aceh. The method used is descriptive qualitative method where data is collected through literature study, interviews and documentation. The results showed that economic factors, culture and disappointment in Aceh were the causes of the rebellion. In the next development, the rebellion claimed many victims, especially civilians. In the process towards peace, state leaders have their own ways to achieve peace with the Free Aceh Movement. The peace agreement between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement occurred through negotiations in Helsinki, known as the Helsinki MoU.

Keyword: Aceh, Conflict, Soft Power, Hard Power

PENDAHULUAN

Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (civil disobedience) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Pada kasus Aceh, kecemburuan-kecemburuan sosial yang terjadi pada awal tahun 1970-an menjadikan kondisi Aceh menjadi beda. Ditemukannya sumber gas di Arun, lalu pembukaan sejumlah kilang raksasa lainnya di zona industri Lhoksumawe adalah faktor lain yang tak bisa dipisahkan dari warna konflik setempat. Jumlah pengangguran yang membengkak seiring tumbuhnya generasi pencari kerja baru di Aceh makin menyuburkan kondisi kecemburuan sosial itu. Masyarakat Aceh

adalah masyarakat yang memiliki identitas kultural yang sangat kuat, serta menjunjung adat mereka yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Identitas sosio-kultural yang begitu kuat inilah yang menyebabkan masyarakat Aceh menuntut diterapkannya identitas keislaman masyarakat Aceh. Faktor selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Orde Baru yang ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Aset-aset sumber daya alam di Aceh dieksploitasi dalam konteks pembangunan ini. Hubungan pusat-daerah yang tidak harmonis inilah yang menjadi pusat dari dua gerakan separatis utama di Aceh. Setelah Pemberontakan DI/ TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat kembali terefleksikan

dalam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro (Darmanik, 2010: 19).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6).

Data primer diperoleh dari sumber primer yaitu peneliti (penulis) yang secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian yang dituliskan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber sekunder yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu atau lebih yang telah lepas dari kejadian aslinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi perpustakaan, dokumentasi dan wawancara.

Konsep *Soft Power* dan *Hard Power*

Untuk menganalisis proses menuju perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia, peneliti menggunakan konsep utama yaitu *Soft Power* dan *hard power* oleh Joseph S. Nye (2008:94). Dalam menyelesaikan konflik, diperlukan power dari aktor-aktor yang terlibat konflik. Perwujudan power tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni ancaman atau tindakan koersif ("*sticks*"), pancingan dan pembayaran/*payments* ("*carrots*") serta daya tarik untuk membuat pihak lain melakukan

apa yang diinginkan. Power yang diwujudkan melalui dua cara pertama diasosiasikan dengan *hard*, sedangkan yang diwujudkan melalui daya tarik, menurut Joseph S. Nye (2009: 2) dikategorikan sebagai *soft power*. Menurut Nye, power adalah kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Nye (2005: 88) menggolongkan power dalam dua spektrum perilaku yang berbeda, yakni *hard power* yang digolongkan dalam spektrum perilaku *command power*, yakni kemampuan untuk mengubah apa yang pihak lain lakukan (*what others do*) dan *soft power* dalam spektrum perilaku *co-optive power*, yakni kemampuan untuk dapat mempengaruhi dan membentuk apa yang pihak lain inginkan (*what others want*). *Cooptive power* dapat diperoleh melalui agenda *setting* (manipulasi agenda pilihan politik sehingga pihak lain gagal mengekspresikan suatu preferensi politik tertentu karena merasa preferensi tersebut terlihat tidak realistis yang bersumber pada institusi) atau melalui *attraction* (daya tarik yang bersumber pada budaya, nilai-nilai dan kebijakan yang dimiliki).

Soft power kemudian didefinisikan Nye sebagai kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (*power*) tersebut melalui penggunaan daya tarik daripada penggunaan kekerasan (*coercion*) atau imbalan (*payment*). *Soft power* bersumber dari aset-aset yang dapat digunakan untuk memproduksi daya tarik. Nye menjabarkan bahwa *soft power* suatu negara utamanya didasarkan pada tiga sumber, yaitu kebudayaan (*culture*, yang membuat negara tersebut menarik bagi pihak lain), nilai politik (*political values*, yang dianut negara tersebut di dalam maupun luar negeri) dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*, yang membuat

negara memiliki legitimasi dan otoritas moral).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi aceh sebelum terjadi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Dimulai sejak pasca kemerdekaan Indonesia, kondisi Aceh sudah diwarnai dengan berbagai konflik. Akar permasalahan konflik di Aceh didasari banyaknya kekecewaankecewaan yang terus dialami oleh rakyat Aceh. Dalam persoalan konflik konteks struktur dan fungsi kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan harus diperhatikan karena masyarakat sebagai suatu unit entitas akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan konflik. Semasa Agresi Belanda I dan II, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang tidak dikuasai Belanda. Aceh mengambil peran penting pada saat Agresi Militer Belanda II, saat itu pemerintahan di Bukittinggi tumbang, dan Acehlah yang mengambil peranan sebagai pemerintah pusat, tepatnya di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Ketika Soekarno datang ke Aceh menemui Daud Beureuh. Soekarno meminta agar rakyat Aceh turut mendukung perjuangan Indonesia dalam menghadapi Belanda guna mempertahankan kemerdekaan. Daud Beureuh pun setuju. Rakyat Aceh turut menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Soekarno berjanji akan menerapkan syariat Islam di Aceh setelah perjuangan kemerdekaan berakhir. Namun, janji ini tidak pernah terpenuhi. Aceh tidak diberi otonomi daerah dengan penerapan syariat Islam, justru Aceh dimasukkan kedalam Provinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh, seorang ulama terkenal dengan atas nama rakyat Aceh

mengumumkan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosoewirjo. Dimulai sejak pasca kemerdekaan Indonesia, kondisi Aceh sudah diwarnai dengan berbagai konflik. Akar permasalahan konflik di Aceh didasari banyaknya kekecewaankecewaan yang terus dialami oleh rakyat Aceh. Dalam persoalan konflik konteks struktur dan fungsi kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan harus diperhatikan karena masyarakat sebagai suatu unit entitas akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan konflik. Semasa Agresi Belanda I dan II, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang tidak dikuasai Belanda. Aceh mengambil peran penting pada saat Agresi Militer Belanda II, saat itu pemerintahan di Bukittinggi tumbang, dan Acehlah yang mengambil peranan sebagai pemerintah pusat, tepatnya di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Ketika Soekarno datang ke Aceh menemui Daud Beureuh. Soekarno meminta agar rakyat Aceh turut mendukung perjuangan Indonesia dalam menghadapi Belanda guna mempertahankan kemerdekaan. Soekarno berjanji akan menerapkan syariat Islam di Aceh setelah perjuangan kemerdekaan berakhir. Namun, janji ini tidak pernah terpenuhi. Aceh tidak diberi otonomi daerah dengan penerapan syariat Islam, justru Aceh dimasukkan kedalam Provinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh, seorang ulama terkenal dengan atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosoewirjo.

2. Factor penyebab terjadinya pemberontakan gerakan aceh merdeka

A. Faktor Ekonomi

Dari sisi ekonomi, masalah eksploitasi ekonomi menjadi akar konflik yang patut dicermati. Aceh adalah daerah yang kaya

akan sumber daya alam. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya ladang gas alam Arun. Beroperasinya kilang gas Arun tahun 1977 di Lhoksumawe, ibukota Aceh Utara, menjadikan Aceh sebagai kawasan industri strategis. Arti strategis bertambah dengan berdirinya pabrik pupuk Iskandar Muda dan Pabrik Pupuk Asean, serta pabrik kertas PT. Kraft. Kekayaan alam yang terus digali dan beroperasinya perusahaan-perusahaan nasional membuat Aceh mampu menyumbangkan devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai gambaran pada tahun 1993 dari 6,644 trilyun penghasilan bersih negara dari sektor migas, hanya 453,9 milyar yang kembali ke Aceh. Kekayaan daerah tersebut terserap ke pemerintah pusat tanpa pengembalian yang sepadan ke Aceh untuk keperluan pembangunan sehingga Aceh mengalami ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain.

B. Faktor Budaya

Aceh sejak dahulu merupakan wilayah yang istimewa dan berbeda dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selain memegang teguh prinsip dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, Aceh merupakan kesultanan yang merdeka sebelum datangnya kolonial Belanda pada tahun 1873, ditambah lagi Aceh juga memiliki identitas regional, etnis dan nasionalisme yang kuat. Keinginan Aceh yang begitu kuat untuk melaksanakan syariat Islam mendapat tentangan keras dari pemerintah Pusat. Pemerintah pusat tidak ingin Indonesia yang baru merdeka menjadi terpecah karena penerapan negara Islam. Pikiran ini justru sangat bertentangan bagi rakyat Aceh, yang menganggap justru pemerntahan Soekarno tidak sesuai lagi dengan sila pertama Pancasila yang menyebutkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap usaha masyarakat Aceh untuk melestarikan keistimewaan tersebut seperti telah dijelaskan diatas, dianggap sebagai ancaman pada masa nation building di masa pemerintahan Soekarno dan ideologi pembangunan yang sentralistik pada masa pemerintahan Soeharto

C. Faktor Kekecewaan-kekecewaan yang Dirasakan Masyarakat Aceh

Presiden Soekarno menjanjikan diterapkannya syariat Islam di Aceh setelah perjuangan kemerdekaan berakhir. Akan tetapi, janji tersebut tidak pernah terpenuhi. Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat islam seperti yang telah dijanjikan, tetapi Aceh justru dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan-kekecewaan ini menghasilkan pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) pada tahun 1953. Selain itu, Sekalipun diberikan status Daerah Istimewa Aceh, masyarakat Aceh sendiri sama sekali tidak merasakan keistimewaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat tidak memfasilitasinya dengan perangkat hukum, perundang-undangan, dan peraturan maupun penyediaan anggaran yang memadai untuk merealisasikan keistimewaan tersebut. Akibatnya keistimewaan tersebut tidak lebih hanya merupakan simbol kosong.

3. Pemberontakan GAM tahun 1976-2005

A. Awal Pembentukan

Hasan Tiro membangun markas GAM pertama kali di hutan Pantan Weng di Pidie, yang kemudian dipindahkannya ke tempat yang lebih aman di Bukit Cokan, masih di kabupaten Pidie. Di Bukit Cokan Gle 6 Saba, Tiro, Pidie, 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan Aceh.

Tanggal ini sengaja ia pilih untuk menolak catatan sejarah versi Belanda. Menurut catatan sejarah tersebut pada tanggal 3 Desember 1911 Belanda telah menembak mati Tengku Cik Di Tiro, pejuang Aceh. Oleh Belanda sejarah kematian ini diartikulasikan sebagai salah satu tanda berakhirnya perang Aceh yang berlangsung sejak 1873. Oleh karenanya Hasan Tiro memilih tanggal 4 Desember 1976 sebagai kebangkitan kembali dan kelanjutan dari eksistensi Aceh. Dimata Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda (Darmanik, 2010: 202).

B. Pemberontakan GAM (1977-2005)

Pada awal kemunculannya, gerakan ini hanya mendapat dukungan kecil Hasan Tiro, yang pada waktu itu adalah seorang pebisnis lokal dan sebelumnya pernah menjadi wakil Darul Islam di PBB, mendirikan GAM pada Oktober 1976. Dia mengecam kekuasaan kolonial “Jawa” dan khususnya eksploitasi sumber-sumber daya alam Aceh serta penggunaan kekuatan militer untuk menjaga kontrol. Hanya dengan beberapa ratus pendukung, gerakan itu mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-Sumatera pada 1977, sesekali menyebarkan propaganda, dan mengibarkan bendera GAM di berbagai lokasi, tetapi hanya sedikit melakukan tindakan militer. Kelompok ini terutama terdiri dari para intelektual, teknokrat dan pebisnis.

Sejak pertengahan 1980-an, para pemimpin GAM di Malaysia merekrut ratusan orang Aceh yang tinggal di Aceh dan Malaysia untuk menjalani pelatihan militer di Libya. Setelah kembali ke Aceh pada 1989, mereka melancarkan serangkaian serangan gerilya. GAM muncul lagi, dan dipersenjatai lebih baik dan melancarkan serangan yang lebih gencar meski tetap relatif kecil, dengan anggota inti beberapa ratus pejuang aktif. Tahap kedua, pemimpin yang bergabung

selama fase ini adalah Sofyan Dawood (komandan GAM di Pase, Aceh Utara) dan Ishak Daud (yang menjadi juru bicara GAM di Peureulak, Aceh Timur). Namun, gerakan gerilya ini kembali berhasil dilumpuhkan oleh militer dan Aceh pun dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1992. Kebijakan operasi militer yang terus berlanjut hingga 1998 ini berdampak pada pelanggaran HAM berat, sehingga kebencian rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia semakin dalam.

Pemicu eskalasi konflik selama masa transisi demokrasi adalah operasi militer kedua pada tahun 1999. Operasi militer yang diputuskan dibawah tekanan TNI terhadap pemerintah sipil Indonesia. Kedua belah pihak pada dasarnya menggunakan coercive action atau “contending strategy” (strategi berkelahi).

Abdurrahman Wahid mendekati GAM dan mencapai suatu kesepakatan mengenai “jeda kemanusiaan”. Dibawah mediasi Henry Dunant Centre di Swiss, kesepakatan itu ditandatangani pada 12 Mei 2000 dalam suatu pertemuan yang dihadiri Hasan Tiro, pemimpin GAM di pengasingan. “Jeda kemanusiaan” semula dilihat sebagai kemenangan gemilang Abdurrahman Wahid karena dilakukan hanya tiga bulan setelah ia menjadi presiden. Pemerintah Megawati juga mencapai kesepakatan baru dengan GAM. Suatu kesepakatan penghentian permusuhan ditandatangani pada 9 Desember 2002.

4. Penyelesaian Konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia

Pada tahun 2004 Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) kembali melakukan negosiasi terhadap GAM dengan melibatkan CMI sebagai pihak eksternal yang menghasilkan satu Nota Kesepahaman (MoU

Helsinki) perdamaian Indonesia-Aceh yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 (Djumala, 2013: 17). Pemerintah Indonesia membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Hamid Awaluddin (Menteri Keadilan dan Hak Asasi Manusia), Sofyan Jalil (Menteri Komunikasi) dan Farid Husain (Seorang Direktur Jenderal di Departmen Kesehatan) untuk menjalankan negosiasi dengan GAM.

GAM sendiri bersedia melakukan dialog dengan Pemerintah RI (SBY-JK) yang dimediasi oleh CMI walaupun ketika dialog berlangsung militer RI masih menyerang dan membunuh anggota GAM di Aceh. Perundingan harus dibicarakan dalam kerangka otonomi secara komprehensif, utuh, dan bertahap dengan batas waktu perundingan yang harus diakhiri pada bulan Juli 2005 (Kingsbury, 2006: 67).

Kemudian perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia dikenal dengan MoU Helsinki. Pemerintah Indonesia telah menuangkan MoU ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006. Dengan UUPA, Aceh diharapkan tidak saja menggantikan status Otonomi Khusus kepada Otonomi seluas-luasnya, tetapi juga menempatkan Aceh sebagai daerah *self-government* (pemerintahan sendiri) (Sugeng, dkk, 2010). Dengan demikian, Aceh diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri untuk membangun Aceh supaya “merdeka” secara substansi, yaitu sejahtera, adil, dan bermartabat sehingga masyarakat Aceh dapat merasakan perdamaian positif secara berkelanjutan.

5. Hard power dan soft power dalam penyelesaian konflik GAM dan Pemerintah Indonesia

Konsep dari Joseph Nye yang menunjukkan bahwa hard power mengarah kepada penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik. Pola ini dipakai oleh

Presiden Megawati saat menetapkan Darurat Militer untuk Aceh. Sedangkan soft power merupakan penggunaan cara-cara dialogis untuk menyelesaikan.

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwasanya setiap presiden yang pernah memimpin di Indonesia memiliki cara mereka masing-masing dalam mengatasi konflik yang ada di Aceh, baik itu dengan cara kelembutan atau cara kekerasan. Namun, jika mengabaikan banyak aspek seperti keamanan dan keselamatan, semuanya itu berdampak kepada masyarakat.

Presiden	Hard power	Soft power
Soeharto	DOM	-
Habibie	-	Pencabutan DOM
Abdurrahman wahid	-	Jeda kemanusiaan
Megawati soekarno putri	Darurat militer Darurat sipil	CoHA
SBY-JK		MoU helsinki

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia telah dilakukan dalam dua bentuk konsep, yaitu hard power dan soft power. Hard power digunakan pemerintah Indonesia pada penetapan DOM di Aceh. Tindakan hard power dilakukan dengan cara teror dan intimidasi. Sikap politik Soeharto dan TNI yang keras terhadap GAM dirasionalisasi dengan semboyan “NKRI harga mati”, dan tidak ada ideologi selain Pancasila di Indonesia. Tindakan soft power dilakukan dengan memulai proses negosiasi. Pemerintah Indonesia segera mengintensifkan dialog dengan semua elemen masyarakat Aceh, bahkan dengan

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif Aceh agar memperoleh kesepakatan mengenai langkah-langkah penyelesaian konflik secara komprehensif secepat mungkin (Nurhasim 2008). Ketika itulah “embrio” negosiasi (*soft power*) mulai muncul yang kemudian ditindak lanjut oleh pemerintah berikutnya.

SARAN

Dalam penyelesaian konflik dibutuhkan ketelitian dalam menganalisis *factor structural* dari penyebab sebuah konflik. Sehingga para stakeholders dapat mengambil keputusan terbaik dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Untuk kasus Aceh yang masyarakatnya sudah memiliki memori kolektif tentang pemerintah Indonesia, tindakan *hard power* akan menambah kebencian dan tidak akan mendatangkan perdamaian. Begitu juga pada konflik-konflik daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (edisi revisi II). Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Asnawi, Safruddin,. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban* (terjemahan). Surabaya: Pustaka Eureka.
- Bungin, M. Buhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, A. Taufan. 2010. *Hasan Tiro: From the Imagination of an Islamic State to the Imagination of Ethnonationalism*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI).
- Daud, A., Husda, H., Umar, M., Al Chaidar. 2010. *Aceh dari Konflik ke Damai*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Djumala, D. 2013. *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Furlong, Gary T. 2005. *The Conflict Resolution Toolbox*. Ontario: John Wiley & Sons Canada.
- Gade, M., Ismail, Otto S., Ishak dan Yusni S. 2001. *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik di Aceh dalam Aceh Jakarta Papua*. Jakarta: YAPPIKA.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Hendry Ar, Eka. 2009. *Sosiologi Konflik*. Pontianak: STAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI).
- Husain, Farid. 2007. *To See the Unseen: Kisah di Balik Damai di Aceh*. Jakarta: Health and Hospital Indonesia.
- Kingsbury, D. 2006. *Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Proses*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Lederach, JP. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation; Clear Articulation of the Guiding Principles By a Pioneer in The Field*. New York: Skyhorse Publishing.
- Malik, Ichsan, (ed.), . 2004. *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan perdamaian*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miall, Hugh et al. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition. Boston: Pearson Education.

- Peter Scrooder, Peter. 2009. *Strategi Politik*. Jakarta: FNS.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT . Gramedia Widusuarana.
- Sulaiman, Isa, M. 2000. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Sugeng B., Hadiwinata, Christanty L., Situmorang, M. 2010. *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: dari Kotak Peluru ke Kotak Suara: Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Supranto, J. 2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi)* Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Tafsir. 2007. *Agama Antara Juru Damai Dan Pemicu Konflik*.
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmia Populer* Surabaya : Gitamedia Press.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Won Jeong, Ho. 2010. *Conflict Management and Resolution*. Newyork: Routledge.